

Internalisasi Nilai Moral dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Upaya Kostruktif Resiliensi Pemikiran Mahasiswa Menghadapi Radikalisme

Sri Wahyuni Tanshzil ^{a, 1*}, Gina Lestari ^{b, 2}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

^b Universitas Terbuka, Indonesia

¹ sriwahyunitanshzil@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 17 Mei 2025;

Revised: 18 Juni 2025;

Accepted: 30 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Internalisasi Nilai Moral; Pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan; Resiliensi Pemikiran; Radikalisme di Kampus.

ABSTRAK

Pendidikan Tinggi di Indonesia menghadapi tantangan serius terkait infiltrasi paham radikalisme yang menyasar lingkungan kampus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh internalisasi nilai moral dalam pembelajaran PKn terhadap konstruksi resiliensi pemikiran mahasiswa sebagai strategi kontra-radikalisme, serta memotret keterpaparan mereka terhadap paham radikalisme. Metode kuantitatif digunakan dengan melibatkan 400 mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang mengikuti MKWK PKn tahun akademik 2024/2025. Indikator penelitian disusun berdasarkan pendekatan implementasi *Teori Reasoned Action* (TRA) yang memungkinkan peneliti memahami pemetaan potret internalisasi nilai moral pada pembelajaran PKn terhadap mahasiswa. Hasil menunjukkan bahwa 45% mahasiswa memiliki internalisasi nilai moral tinggi, 53% sedang, dan 2% rendah. Uji korelasi dan regresi membuktikan pengaruh signifikan antara internalisasi nilai moral dan resiliensi pemikiran mahasiswa. Namun, 70% mahasiswa tergolong waspada hingga rawan terpapar paham radikalisme. Oleh karena itu, studi ini mengisi celah kajian pendidikan kewarganegaraan yang berkontribusi terhadap pengembangan integrasi *moral-civic education* dengan TRA dalam memperkuat resiliensi pemikiran mahasiswa sebagai kontra-radikalisme.

ABSTRACT

Keywords:

Moral Value

Internalization; Civic Education Learning;

Cognitive Resilience;

Radicalism on Campus.

The Internalization of Moral Values in Civic Education: Constructive Strategies for Enhancing Students' Resilience Against Radical Ideologies. Moral Value Internalization in Civic Education: Constructing Students' Cognitive Resilience in Responding to Radicalism. Higher education in Indonesia faces serious challenges related to the infiltration of radical ideologies targeting university environments. This study aims to analyze the influence of moral value internalization in Civic Education learning on the construction of students' cognitive resilience as a counter-radicalization strategy, as well as to map their exposure to radical ideologies. A quantitative method was employed, involving 400 students from Universitas Pendidikan Indonesia who were enrolled in the Civic Education course (MKWK PKn) during the 2024/2025 academic year. Research indicators were developed based on the implementation of the Theory of Reasoned Action (TRA), allowing the researchers to understand the mapping of moral value internalization in Civic Education learning among students. The findings show that 45% of students demonstrated a high level of moral value internalization, 53% moderate, and 2% low. Correlation and regression tests confirmed a significant relationship between moral value internalization and students' cognitive resilience. However, 70% of students were categorized as alert to highly vulnerable to radical ideology exposure. Therefore, this study addresses a gap in civic education research by contributing to the development of an integrated moral-civic education framework with TRA to strengthen students' cognitive resilience as a counter-radicalization effort.

Copyright © 2025 (Sri Wahyuni Tanshzil & Gina Lestari). All Right Reserved

How to Cite : Tanshzil, S. W., & Lestari, G. (2025). Internalisasi Nilai Moral dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Upaya Kostruktif Resiliensi Pemikiran Mahasiswa Menghadapi Radikalisme. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(2), 833–845. <https://doi.org/10.21067/jmk.v10i2.12027>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Radikalisme di lingkungan kampus merupakan fenomena yang terus berkembang sejak akhir 1970-an, meskipun mengalami pasang surut dalam pergerakannya. Paham radikalisme mulai menyasar perguruan tinggi sejak akhir 1970-an, yang diinisiasi oleh gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) melalui peristiwa Situaksan di Bandung pada tahun 1971 (Wildan, 2018). Meskipun sempat mereda pasca penumpasan DI/TII, fenomena ini kembali meningkat dan mencapai puncaknya pada era 2000-an, seiring maraknya aksi terorisme serta berkembangnya organisasi keagamaan garis keras seperti Jamaah Islamiyah (JI), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) (Singh & Mulkhan, 2012). Berbagai studi dan laporan dari lembaga resmi seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN) menunjukkan bahwa lingkungan kampus tetap menjadi ruang subur bagi penyebaran ideologi radikal, termasuk melalui media digital yang sulit dikendalikan (BNPT, 2024; Pudjiastuti, 2021). Hiariej (2012) mengemukakan bahwa radikalisme kampus berkembang bersamaan dengan meningkatnya aktivisme Islam garis keras di kampus-kampus besar di Pulau Jawa pada era 1980-an.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil kajian pengembangan BIN (2018) menemukan bahwa 39% mahasiswa di 15 provinsi menunjukkan ketertarikan terhadap paham radikal (Jajuri & Rahmat, 2021). Data serupa juga ditemukan dalam survei BNPT dan BIN (2017) terhadap mahasiswa di 20 perguruan tinggi di 15 provinsi, yang menunjukkan bahwa 39% mahasiswa memiliki sikap anti-Pancasila dan anti-demokrasi. Temuan ini memperkuat anggapan bahwa kampus merupakan ladang subur bagi penanaman paham radikalisme, didukung oleh masifnya penyebaran propaganda ideologi ini melalui media sosial. BNPT (2024) menyatakan bahwa dalam dua tahun terakhir tidak terjadi serangan terorisme di Indonesia. Namun demikian, propaganda kelompok radikal melalui media sosial tetap berlangsung sangat masif, dengan 180.954 konten berbahaya terkait terorisme berhasil diidentifikasi dan diblokir oleh BNPT bersama Komisi Digital Nasional (Komdigi). Sepanjang tahun 2023, terdapat 2.670 temuan konten digital bermuatan Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET), yang sebagian besar ditemukan di platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. Teknologi digital telah menciptakan ruang baru bagi penyebaran ide-ide radikal secara cepat dan luas. Internet, media sosial, serta platform komunikasi daring lainnya memfasilitasi perencanaan, promosi, dan koordinasi aksi radikal secara lebih efisien (Tanszil et al., 2025). Snow dan Cross (2011) menekankan bahwa radikalisme di perguruan tinggi sering kali berkembang melalui proses sosial yang melibatkan afiliasi kelompok, pergeseran norma kolektif, dan legitimasi terhadap ideologi tertentu.

Strategi internasional dan nasional dalam upaya penanggulangan terorisme selama dekade terakhir telah mengalami pergeseran, dari pendekatan represif (hard security) menuju strategi yang multisektoral dan komprehensif (Veenkamp & Zeiger, 2016). Berbagai pendekatan telah dirancang dan dikembangkan untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian sebagai bentuk upaya preventif terhadap radikalisme serta untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis (Kosasih et al., 2022). Inovasi pendekatan ini mencakup pengembangan model *enlightenment against ignorance* yang menekankan aspek pencegahan dan rehabilitasi sosial (Hasanbaev, 2023), serta pemanfaatan teknologi *machine learning* yang dapat mengidentifikasi profil ekstremis berbasis agama dengan tingkat akurasi yang tinggi (Al-Zewairi & Naymat, 2017).

Secara umum, terdapat dua pendekatan utama dalam menangkal radikalisme, yakni *Countering Violent Extremism* (CVE), yaitu pendekatan keras (penegakan hukum dan militer), dan *Preventing Violent Extremism* (PVE), yaitu pendekatan lunak (rehabilitasi, pendidikan, dan dialog) (Kaishauri, 2021). CVE muncul sebagai respons terhadap meningkatnya radikalisasi pada awal tahun 2000-an, dengan strategi integrasi antara deradikalisasi dan rehabilitasi moral guna membantu individu kembali kepada pemahaman moderat (Koehler & Fiebig, 2019). Sementara itu, PVE menawarkan pendekatan preventif yang berfokus pada upaya pencegahan sebelum individu terpapar paham radikal. Berdasarkan hal tersebut, intervensi kontra-radikalisme melalui jalur pendidikan dapat dikategorikan sebagai bagian dari pendekatan PVE. Upaya global dalam melawan ekstremisme kekerasan melalui pendidikan menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam pencegahan radikalisme (Winthrop & Graff, 2010). Pendekatan pendidikan ini dipandang sebagai strategi yang sangat strategis dalam menghambat penyebaran paham radikal, sebagaimana diistilahkan Snow dan Cross (2011) sebagai strategi efektif untuk mengurangi daya tarik radikalisme.

Dalam konteks kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia, peran tersebut dijalankan oleh Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang memuat nilai-nilai moral dan demokrasi sebagai instrumen kontra-radikalisme. PKn berperan penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip demokrasi sebagai fondasi bagi ketahanan mahasiswa terhadap pengaruh ideologi radikal. Kebutuhan akan intervensi pendidikan diperkuat oleh temuan penelitian De Silva (2017) untuk *World Bank*, yang menunjukkan bahwa pendidikan dapat mencegah ekstremisme kekerasan dengan mengatasi akar penyebab radikalisme melalui pemikiran kritis, inklusi sosial, dan toleransi. Selanjutnya dijelaskan bahwa promosi nilai-nilai demokrasi dan prinsip hak asasi manusia (HAM) dapat diintegrasikan melalui program pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) sebagai alat untuk membangun toleransi, pemahaman, dan kohesi sosial. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan teoretis dan empiris dalam mengkaji secara khusus hubungan antara internalisasi nilai moral dalam PKn dengan pembentukan resiliensi berpikir mahasiswa sebagai bentuk kontra-radikalisme.

Penelitian yang mengintegrasikan pembelajaran PKn dengan kerangka *Theory of Reasoned Action* (TRA) masih sangat terbatas. Atas dasar itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pembuktian apakah internalisasi nilai moral melalui Pendidikan Kewarganegaraan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kontra-radikalisme di perguruan tinggi. Penelitian ini berupaya menganalisis potret internalisasi nilai moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi serta potret keterpaparan radikalisme mahasiswa di Perguruan Tinggi. Dengan demikian, perlu digali pula pengaruh internalisasi nilai moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap konstruksi resiliensi pemikiran mahasiswa sebagai counter radikalisme di kampus. Penelitian ini juga berupaya membuktikan signifikansi internalisasi nilai moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan pengaruhnya terhadap tingkat penguatan resiliensi mahasiswa terhadap radikalisme.

Metode

Metode deskriptif korelasi digunakan peneliti untuk memotret korelasi antara dua variabel atau lebih dalam penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan dalam penelitian yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010). Adapun pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis fakta, gejala dan kasus berupa angka dan analisis statistik terhadap fakta

dan data yang terukur, rasional dan objektif. Metode ini memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang kongkrit, empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis (Sugiyono, 2011). Populasi penelitian mencakup seluruh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang mengikuti mata kuliah Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) PKn pada tahun akademik 2024/2025 sebanyak 6.452 orang. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh 400 responden yang dipilih melalui teknik proportional random sampling dari empat fakultas. Adapun instrumen penelitian disusun berdasarkan pendekatan TRA (Fishbein dan Ajzen, 1975) yang mengkaji hubungan antara keyakinan, sikap, niat dan perilaku mahasiswa dalam internalisasi nilai moral pembelajaran PKn. Instrumen terdiri dari 42 item pernyataan yang diukur menggunakan skala Likert 5 poin. Validitas isi dikaji oleh tiga pakar, sedangkan validitas empiris diuji melalui korelasi Pearson product moment ($r > 0,30$). Reliabilitas instrumen diuji menggunakan koefisien Cronbach's Alpha sebesar 0,874. Analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS versi 26 melalui uji deskriptif, korelasi Pearson, dan regresi linear sederhana yang didahului oleh uji asumsi statistik meliputi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji linearitas, dan uji multikolinearitas.

Hasil dan pembahasan

Potret internalisasi nilai moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap mahasiswa di Perguruan Tinggi merujuk pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dalam kegiatan belajar MKWU Pendidikan Kewarganegaraan di Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek, 2024). Indikator yang digunakan untuk memotret internalisasi nilai moral dalam pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi terdiri atas sembilan butir fokus analisis yaitu; (1) memperkuat identitas kebangsaan melalui PKn; (2) kepedulian terhadap identitas nasional, pembangunan bangsa, dan pembentukan karakter berdasar nilai-nilai Pancasila; (3) kesadaran dalam mewujudkan integrasi nasional serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; (4) komitmen dalam mengimplementasikan nilai norma berdasar konstitusi; (5) menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara; (6) melaksanakan demokrasi berakar Pancasila dan UUD 1945; (7) menunjukkan pemahaman akan pelaksanaan penegakan hukum yang adil; (8) memahami dan meyakini wawasan nusantara sebagai pandangan kolektif bangsa; (9) membangun komitmen kolektif yang kuat terhadap ketahanan nasional.

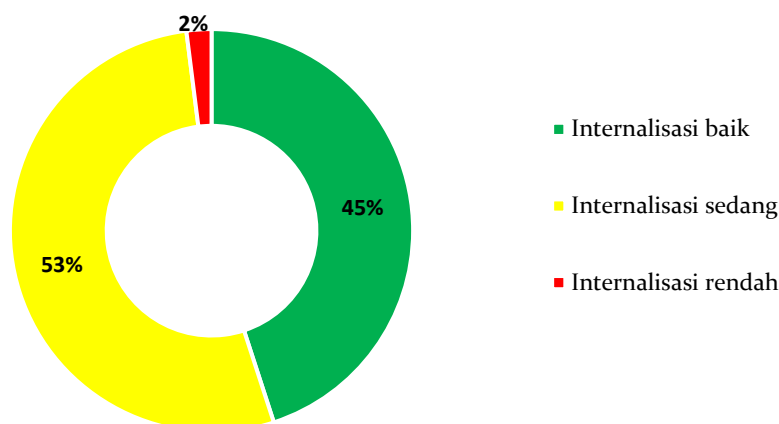


Diagram 1. Potret Internalisasi Nilai Moral dalam Pembelajaran PKn pada Mahasiswa

Potret internalisasi nilai moral dalam pembelajaran PKn diukur berdasarkan keyakinan (*beliefs*), sikap (*attitude*), kehendak (*intention*), dan perilaku (*behavior*) mahasiswa

berdasarkan capaian pembelajaran PKn yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil uji frekuensi statistik, ditemukan bahwa sebanyak 178 (45%) mahasiswa dengan internalisasi nilai moral yang baik, 215 mahasiswa (53%) dengan internalisasi nilai moral yang sedang dan 7 mahasiswa (2%) dengan internalisasi nilai moral yang rendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa berada pada kategori internalisasi nilai moral tingkat sedang. Temuan ini mencerminkan bahwa secara umum mahasiswa telah memiliki kesadaran dasar terhadap nilai-nilai moral yang ditanamkan melalui pembelajaran PKn. Kesadaran dasar tersebut diantaranya yaitu kesadaran akan nilai-nilai Pancasila, norma konstitusional, serta prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Namun demikian, internalisasi nilai-nilai tersebut belum mencapai tingkat yang mendalam atau bersifat transformatif. Oleh karena itu, upaya untuk menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai moral dalam pembelajaran PKn perlu terus diperkuat agar dapat terwujud dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, proporsi mahasiswa yang berada pada kategori rendah mengindikasikan perlunya intervensi pedagogis yang lebih intensif. Kelompok ini merepresentasikan mahasiswa yang belum memperoleh pemahaman komprehensif mengenai nilai-nilai kewarganegaraan, sehingga berpotensi lebih rentan terhadap pengaruh ideologi yang bertentangan dengan semangat kebangsaan, seperti radikalisme dan intoleransi. Sebaliknya, mahasiswa yang tergolong dalam kategori internalisasi nilai moral tinggi menunjukkan kapasitas kognitif yang lebih baik dalam memahami materi PKn, serta mampu menjadikannya sebagai instrumen untuk memperkuat identitas nasional, menegakkan keadilan hukum, dan membangun ketahanan kolektif bangsa berdasarkan wawasan kebangsaan. Kelompok ini juga cenderung memiliki komitmen yang lebih kuat dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara demokratis yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Temuan penelitian tentang analisis setiap variabel menunjukkan bahwa beberapa variabel yang diukur menunjukkan internalisasi yang lebih rendah dibanding variabel lain. Berikut merupakan tiga variabel yang menjadi evaluasi dan harus diperkuat dalam pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi;

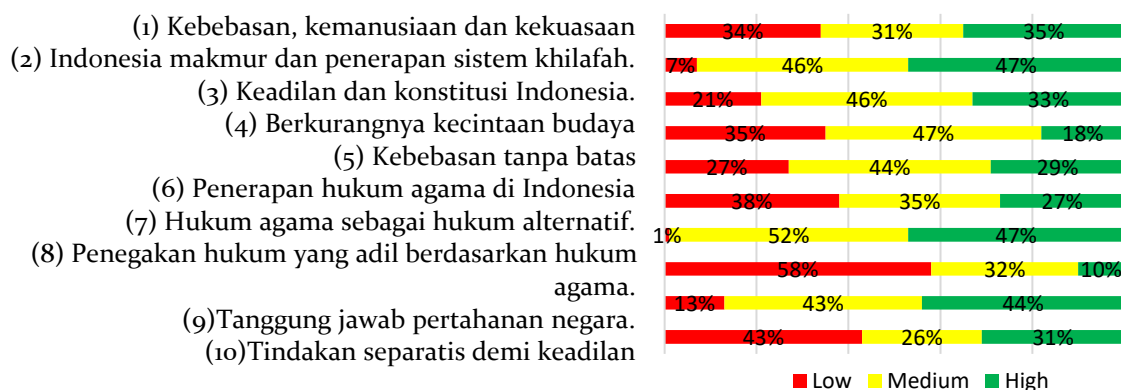


Diagram 2. Variabel yang Perlu Dievaluasi dan Ditingkatkan

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat tiga variabel yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan karena pemahaman mahasiswa yang cenderung rendah. Ketiga variabel tersebut yaitu a) pemahaman tentang sistem pemerintahan, b) pemahaman dalam memperkuat identitas keindonesiaan dan integrasi kebangsaan serta c) perspektif mahasiswa tentang hukum dan keadilan. Sebanyak 34% mahasiswa berpandangan bahwa konsep keadilan tidak terpenuhi

melalui konstitusi negara. Keadilan dipandang hanya milik segolongan tertentu yang memiliki supremasi terhadap sistem hukum dan keadilan. Selain itu, sebanyak 35% mahasiswa memandang bahwa sistem pemerintahan khilafah merupakan sistem yang ideal untuk menggantikan sistem pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, penguatan pemahaman mahasiswa terhadap sistem pemerintahan Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta UUD NRI Tahun 1945 menjadi kebutuhan mendesak.

Selain itu, sebagian besar responden (35% menyatakan selalu dan 47% menyatakan terkadang) menunjukkan ketertarikan yang lebih besar terhadap budaya asing dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran orientasi kultural yang dapat memengaruhi konstruksi identitas nasional di kalangan generasi muda. Sebagaimana dikemukakan oleh Hobsbawm (1990), identitas budaya nasional dapat terancam apabila generasi mudanya tidak memiliki keterikatan yang kuat terhadap warisan budaya lokal sebagai bagian dari identitas kolektif bangsa. Selain itu, pemahaman mahasiswa terhadap prinsip kebebasan berpendapat di ruang publik, khususnya di media sosial, menunjukkan kerentanan konseptual. Sebanyak 27% responden meyakini bahwa kebebasan berpendapat tidak perlu dibatasi, sementara 44% lainnya menunjukkan ambivalensi terhadap isu tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya pendalaman literasi demokrasi digital, sebagaimana dinyatakan oleh Rheingold (2012), bahwa kebebasan berekspresi di era digital harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan etika kewarganegaraan digital.

Dalam aspek pemahaman bela negara, hanya 44% mahasiswa yang menyadari bahwa bela negara merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, bukan semata-mata tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Sementara itu, 13% responden tidak memahami konsep bela negara, dan 43% lainnya berada dalam posisi ragu-ragu. Data ini menunjukkan lemahnya kesadaran konstitusional mahasiswa terhadap konsep bela negara sebagai hak sekaligus kewajiban, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Budimansyah (2010), rendahnya pemahaman terhadap bela negara dapat menghambat terbentuknya *civic disposition* yang berorientasi pada ketahanan nasional. Dengan demikian, diperlukan penguatan literasi kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis yang komprehensif dan aplikatif, guna membentuk pemahaman yang utuh terhadap dimensi bela negara dalam berbagai bentuknya, baik fisik maupun non-fisik. Penguatan ini perlu dilakukan melalui integrasi nilai, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan secara simultan sebagaimana ditekankan dalam kerangka *Civic Competence Model* (Hoskins & Mascherini, 2009).

Persentase tanggapan mahasiswa terhadap sistem dan penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Sebanyak 38% responden menyatakan bahwa hukum di Indonesia sebaiknya diterapkan berdasarkan syariat agama, sementara 58% lainnya berpendapat bahwa penegakan hukum tidak akan adil tanpa intervensi hukum agama. Temuan ini mengindikasikan adanya krisis kepercayaan terhadap sistem hukum nasional, yang diduga dipengaruhi oleh rasa frustrasi dan ketidakpuasan atas ketimpangan hukum yang terjadi. Asumsi ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa 43% mahasiswa menyetujui tindakan separatisme sebagai respons masyarakat terhadap ketidakadilan, dengan dalih memperoleh keadilan. Kondisi ini mencerminkan sikap apatis terhadap sistem penegakan hukum dan berpotensi mendorong mahasiswa pada cara pandang ekstrem. Dalam konteks

tersebut, legitimasi terhadap kekerasan atas nama keadilan dapat menjadi pemicu tumbuhnya pemahaman radikal di kalangan mahasiswa.

Pengembangan model pembelajaran PKn harus dilakukan secara lebih kontekstual dan transformatif, tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga menekankan internalisasi nilai serta sikap kebangsaan secara mendalam. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka TRA yang menegaskan bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai tertentu memiliki pengaruh langsung terhadap pembentukan sikap dan intensi perilaku kewarganegaraan. Dalam konteks ini, penguatan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat menjadi bagian strategis dari pendekatan PVE sebagai upaya kontra-radikalisme di lingkungan kampus. Pendidikan kewarganegaraan dinilai memiliki peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi, toleransi, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang inklusif. Berbagai literatur juga mendorong pentingnya revitalisasi mata kuliah ideologis sebagai strategi pencegahan penyebaran paham radikal di kalangan mahasiswa. Azra (2011) menegaskan bahwa penguatan mata kuliah seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, dan Pendidikan Agama merupakan langkah strategis dalam membangun kontra-ideologi berbasis nilai keagamaan yang moderat dan berakar pada konteks keindonesiaan.

Potret keterpaparan mahasiswa terhadap paham radikalisme dianalisis dengan pendekatan TRA dimana aspek keyakinan (*beliefs*) digunakan untuk mengukur tingkat fanatisme atau keyakinan individu akan satu hal tanpa didasari pemikiran rasional dan kritis. Aspek sikap (*attitude*) diukur dengan indikator sikap intoleran yang tidak menerima perbedaan pendapat maupun keyakinan orang lain. Aspek kehendak (*intention*) diukur dengan indikator eksklusifisme yang memiliki kecenderungan tertutup dan aspek perilaku (*behavior*) diukur dengan perilaku revolusioner, ekstrimisme dan agresivisme. Berikut merupakan hasil interpretasi interval kategori keterpaparan radikalisme terhadap mahasiswa;

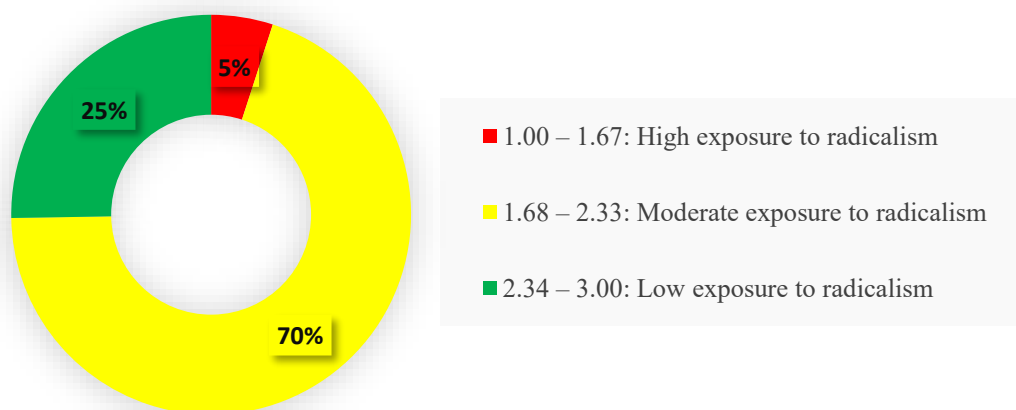


Diagram 3. Potret Keterpaparan Mahasiswa Terhadap Paham Radikalisme

Berdasarkan uji frekuensi terhadap 15 item pernyataan, diperoleh hasil bahwa 5% mahasiswa terindikasi terpapar paham radikalisme, 70% mahasiswa waspada-rawan dan 25% mahasiswa aman dari keterpaparan radikalisme. Berdasarkan grafik pada gambar 3, tingkat fanatisme mahasiswa dapat diamati dari pandangan 39% mahasiswa yang meyakini bahwa prinsip dan nilai yang dipegang teguh adalah paling benar (Inttn-x2). Adapun sikap intoleran terlihat dari 35% mahasiswa yang berkecenderungan untuk menyeragamkan perbedaan pendapat (Attd-x2). Fakta ini diperkuat dengan hasil riset Lembaga Survey Indonesia (LSI)

tahun 2022 dimana kurang dari 20% responden menyatakan tidak banyak berhubungan dengan umat agama lain sebagai tetangga, teman kerja, teman dekat, kolega atau teman di internet. Hal ini menandakan fundamentalisme (radikalisme dalam pikiran) dan intoleransi yang mengawatirkan.

Indikator eksklusifisme diamati dari kecenderungan 60% mahasiswa yang meyakini bahwa pendapat yang benar harus di bela dan pendapat yang salah harus dijauhi (Attd-x₁). Sebagian besar mahasiswa masih memandang perbedaan secara parsial, hitam-putih dan dikotomis. Sudut pandang yang demikian membawa pada eksklusifisme yang mendorong pandangan-pandangan non kompromis, enggan menerima perbedaan. Sebanyak 60% mahasiswa memiliki kecenderungan berperilaku agresivisme dengan melakukan apapun untuk mencapai keinginan (Bhvr-x₂). Kecenderungan tersebut diperkuat oleh pandangan ekstrimisme dimana 66% mahasiswa berpandangan akan memperjuangkan ideologi yang diyakini dengan segala cara. Bibit paham radikalisme pada mahasiswa patut diwaspadai sehingga upaya pencegahan dengan pendekatan PVE melalui pendidikan kewarganegaraan mutlak dilakukan. Sjoen & Jore (2019) memaparkan bahwa upaya kontra-radikalisme yang banyak menyebar di sebagian besar dunia menjadikan pendidikan (sekolah dan universitas) sebagai upaya kontra-radikalisme. Sektor ini dipandang potensial membangun imunitas terhadap ideologi ekstim dan radikal dengan mendorong upaya dialog, pemikiran kritis, inklusif dan pembentukan nilai-nilai demokrasi. Institusi pendidikan harus fokus pada pemberdayaan siswa untuk menjadi warga negara aktif yang dapat secara kritis menilai dan menolak narasi ekstremis (Gosh, Chan, Manuel & Dilimulati, 2016; Anggraeni, L., Darmawan, C., & Tanszil, S. W., 2019). Sejalan dengan pandangan tersebut, Aly et al., (2014) dan Davies, (2009) memandang bahwa intervensi pendidikan dalam gerakan kontra-radikalisasi dilaksanakan melalui pengajaran mata pelajaran yang mengedepankan toleransi, pemahaman, dan pendidikan kewarganegaraan (Aly et al., 2014; Davies, 2009).

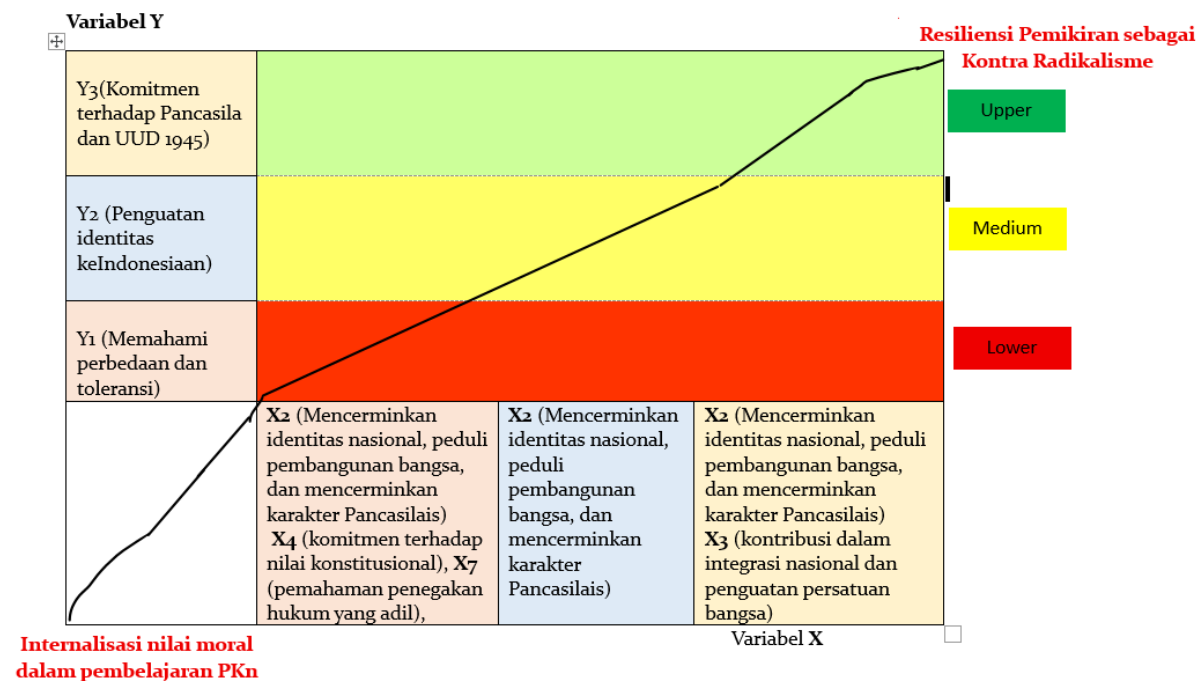
Pengaruh internalisasi nilai moral dalam pembelajaran PKn terhadap resiliensi pemikiran mahasiswa diukur dengan uji korelasi statistik terhadap dua variabel sebagai berikut;

Tabel 1. Uji Regresi Multivariate terhadap variabel indefenden dan defenden

Model	(R ²)	SE	Var.	B (Koef.)	SE	CI 95% (Lower - Upper)
Y ₁ (Memahami perbedaan dan toleransi)	0.489	2.249	X ₂	0.622	0.091	0.444 – 0.800
			X ₄	0.491	0.091	0.313 – 0.669
			X ₇	0.344	0.070	0.207 – 0.481
Y ₂ (Penguatan identitas keIndonesiaan)	0.112	1.162	X ₂	0.117	0.047	0.025 – 0.209
Y ₃ (Komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945)	0.163	0.955	X ₂	0.165	0.039	0.089 – 0.241
			X ₃	0.098	0.040	0.020 – 0.176

Internalisasi nilai moral dalam pembelajaran PKn merupakan variabel bebas (X) dan resiliensi pemikiran mahasiswa merupakan variabel terikat (Y). Hasil uji korelasi menunjukkan nilai *Pearson Correlation* (*r*) sebesar **0,536** atau (*r* > 0). Hasil ini menunjukkan hubungan yang positif antara variabel internalisasi nilai moral dalam pembelajaran PKn (X_{total}) dengan variabel resiliensi pemikiran mahasiswa (Y_{total}). Adapun hasil penghitungan signifikansi 0,000 (*p* < 0,05) menunjukkan hubungan yang signifikan antar variabel X dan Y tersebut. Berikut

merupakan gambaran pengaruh internalisasi nilai moral dalam pembelajaran PKn terhadap resiliensi peikiran mahasiswa sebagai kounter-radikalisme berdasarkan hasil uji regresi lengkap;



Tabel 2. Pengaruh Internalisasi Nilai Moral Terhadap Resiliensi Peikiran Mahasiswa

Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi skor total internalisasi nilai moral dalam pembelajaran PKn, semakin tinggi pula resiliensi pemikiran mahasiswa. Berdasarkan uji regresi ditemukan bahwa kepedulian mahasiswa terhadap identitas nasional, pembangunan bangsa, dan pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila sangat berpengaruh terhadap tiga faktor yang meningkatkan resiliensi mahasiwa yaitu; (1) pemahaman keberagaman dan toleransi, (2) penguatan identitas kebangsaan, serta (3) penguatan komitmen mahasiswa terhadap Pancasila dan UUD 1945. Nilai signifikansi $< 0,05$ serta nilai koefisien beta tertinggi pada variabel X2 menunjukkan bahwa dimensi ini merupakan prediktor paling dominan dalam model penelitian. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan prasyarat fundamental dalam membentuk *civic disposition* mahasiswa secara komprehensif.

Literasi digital berbasis nilai-nilai kewarganegaraan secara signifikan meningkatkan kualitas pembelajaran PKn, khususnya dalam proses internalisasi karakter kebangsaan dan penguatan kesadaran terhadap pluralisme (Alrahkman, Budimansyah, Sapriya, dan Rahmat, 2024). Lebih lanjut, Rosidah, Budimansyah, dan Komalasari (2023) menyatakan bahwa pembentukan karakter kewargaan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pembelajaran berbasis kearifan lokal menjadi strategi yang relevan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara kontekstual dan bermakna. Konvergensi antara nilai-nilai Pancasila, kompetensi kewargaan, dan pendekatan kontekstual menjadi fondasi utama dalam membentuk ketahanan ideologis mahasiswa dalam menghadapi tantangan global dan infiltrasi ideologi yang bertentangan dengan dasar negara.

Hasil uji multivariat menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang konsep warga negara, komitmen terhadap nilai-nilai konstitusional, serta pemahaman penegakan

hukum yang adil dan pemahaman konsep ketahanan nasional secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap resiliensi pemikiran mahasiswa dalam memandang keberagaman dan toleransi. Selain itu, tingginya realisasi integrasi nasional dan penguatan persatuan bangsa dalam aktivitas sehari-hari mahasiswa berkontribusi signifikan terhadap komitmen mereka dalam memaknai Pancasila dan konstitusi. Temuan ini menegaskan bahwa pembelajaran PKn yang dirancang secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dimensi kognitif, afektif, dan konatif mampu membentuk *civic competence* mahasiswa secara lebih substansial. Transformasi pembelajaran kewarganegaraan berbasis literasi digital juga terbukti memperkuat keterlibatan mahasiswa dalam diskursus demokratis di ruang kelas dan media sosial (Budimansyah & Darmawan, 2023).

Menurut Westheimer dan Kahne (2004), terdapat tiga tipe warga negara yang ideal dibentuk melalui pendidikan kewarganegaraan. *Personally responsible citizen* merupakan warga yang taat hukum, membayar pajak, dan terlibat dalam kegiatan sosial (berorientasi pada perilaku moral pribadi). *Participatory citizen* berperan aktif dalam komunitas dan pemerintahan lokal, seperti terlibat dalam organisasi atau kegiatan demokratis. Sementara itu, *justice-oriented citizen* lebih kritis terhadap ketimpangan sosial dan struktural, serta mendorong perubahan sistemik demi keadilan sosial dan demokrasi yang substansial. Lebih lanjut Mulyana (2024) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus difungsikan sebagai instrumen rekayasa sosial untuk membangun identitas nasional yang kokoh dalam menghadapi tantangan ideologi transnasional dan globalisasi nilai. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mengafirmasi pentingnya desain kurikulum PKn yang berbasis nilai, kontekstual, dan transformatif sebagai upaya membentuk warga negara yang reflektif, toleran, dan resilien secara ideologis.

Peneliti menilai perlunya pengembangan model pembelajaran PKn yang tidak semata berorientasi pada pencapaian kognitif, melainkan juga menanamkan nilai dan sikap kebangsaan secara mendalam. Pendekatan ini selaras dengan implementasi *Theory of Reasoned Action* (Fishbein & Ajzen, 1975) yang menekankan bahwa pemahaman nilai memiliki pengaruh langsung terhadap sikap dan intensi perilaku kewarganegaraan. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan perlu diarahkan sebagai bagian integral dari pendekatan PVE di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini mengingat kampus merupakan salah satu ruang strategis dalam pembentukan kesadaran ideologis generasi muda. Berbagai literatur menunjukkan bahwa revitalisasi mata kuliah yang bersifat ideologis, seperti PKn, Pancasila, dan Pendidikan Agama, menjadi langkah strategis dalam menghadapi penyebaran ideologi radikal di lingkungan pendidikan tinggi. Azra (2011) berpendapat bahwa menghadapi radikalisme tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan, tetapi juga melalui kontra-narasi ideologis yang memperkuat nilai-nilai keindonesiaan, demokrasi, dan toleransi. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan dapat berperan sebagai media kontra-radikalisasi melalui pengarusutamaan nilai-nilai hak asasi manusia, kebhinekaan, dan keadaban publik sebagai fondasi kehidupan berbangsa.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pendekatan kuantitatif yang digunakan tidak sepenuhnya mampu menangkap dimensi mendalam dari pengalaman, persepsi, dan motivasi mahasiswa. Potensi bias dalam pengisian kuesioner, seperti *social desirability bias*, juga menjadi perhatian tersendiri dalam menafsirkan hasil. Oleh karena itu, kajian lanjutan direkomendasikan untuk mengintegrasikan metode kualitatif, seperti wawancara mendalam, guna melakukan triangulasi data dan memperkaya pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi resiliensi pemikiran kewarganegaraan.

Pendekatan kombinasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih holistik serta memperkuat validitas temuan untuk pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan kewarganegaraan yang lebih transformatif di lingkungan perguruan tinggi.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap pembelajaran PKn secara umum berada pada kategori baik. Namun, masih terdapat tiga aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu pemahaman tentang sistem pemerintahan, identitas keindonesiaan dan integritas kebangsaan, serta perspektif hukum dan keadilan. Temuan juga mengungkap adanya potensi keterpaparan terhadap paham radikalisme dalam bentuk intoleransi, eksklusivisme, dan ekstremisme. Uji korelasi dan regresi multivariat membuktikan bahwa pemahaman PKn berpengaruh signifikan terhadap peningkatan resiliensi pemikiran mahasiswa dalam menghadapi radikalisme. Uji korelasi dan regresi multivariat secara empiris membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara internalisasi nilai moral dalam pembelajaran PKn dengan peningkatan resiliensi pemikiran mereka dalam menghadapi ancaman radikalisme. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bagi pengampu kebijakan pendidikan tinggi, terutama dalam merumuskan kurikulum PKn yang berbasis nilai, kontekstual, dan transformatif. Secara praktis, direkomendasikan kepada pihak kampus dan pengambil kebijakan di tingkat pendidikan tinggi untuk mengembangkan program pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan literasi digital, civic engagement, dan deradikalisasi berbasis budaya lokal. Perlu juga dikembangkan program pelatihan dosen yang menekankan pada pedagogi kritis, penggunaan media digital untuk kontra-narasi, serta penguatan peran kampus sebagai ruang aman dan inklusif dalam membentuk ketahanan ideologis generasi muda Indonesia.

Referensi

- Aly, A., Taylor, E., & Karnovsky, S. (2014). *Moral disengagement and building resilience to violent extremism: An education intervention*. *Studies in Conflict & Terrorism*, 37(4), 369–385. DOI: 10.1080/1057610X.2014.879379
- Al-Zewairi M, Naymat G. Spotting the Islamist Radical within: Religious Extremists Profiling in the United State. *Procedia Comput Sci* [Internet]. 2017;113:162–9. <https://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2017.08.336>
- Anggraeni, L., Darmawan, C., & Tanszil, S. W., (2019). *Revitalisasi peran perguruan tinggi dalam menangani gerak radikalisme dan fenomena melemahnya bela negara di kalangan mahasiswa*. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 2, No. 1 Tahun 2019 | Hal. 35 – 40.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Studi Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, A. (2011). *Rekrutmen Sel Radikal di Kampus*. [Online]. Tersedia: <http://cetak.kompas.com/read/.../Rekrutmen.Sel.Radikal.di.Kampus.html> [11 Januari 2012].
- Badan Intelijen Negara: 7 PTN dan 39 mahasiswa terpapar radikalisme dapat diakses di (<http://wow.tribunnews.com/2018/11/21/bin-7-ptn-dan-39-mahasiswa-terpapar-radikalisme-simak-penjelasan-tentang-paham-radikal>).
- Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT), Kedokteran dan Eksakta di
- Budimansyah, D. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan: Kajian Konseptual dan Praktik*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D., & Darmawan, C. (2023). Digital Civic Education: Strategi Literasi Kewargaan di Era Disrupsi. *Jurnal Civicus*, 13(1), 45–58.
- BNPT, BNPT Blokir 180 Ribu Konten Terorisme pada tahun. 2024. dapat diakses pada

- <https://www.rri.co.id/nasional/1211143/bnpt-blokir-180-ribu-konten-terorisme-pada-2024>
Chu, P. (2017). *Empowering Youth through Education: Addressing Future Challenges and Building Resilience against Radicalization*. Singapore: Education and Society Press.
- Davies, L. (2009). *Educating against extremism*. Trentham Books. ISBN: 978-1858564405
- Dewantara, J. A., Suhendar, I. F., Rosyid, R., & Atmaja, T. S. (2021). *Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia*. *International Journal for Educational and Vocational Studies*.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Ginting, S., & Tjandra, M. (2021). *Cultural and Civic Literacy to Strengthen Pancasila as the National Identity and Unifier of Diversity in Indonesia*. PROCEEDING KaPIN International Seminar, 2021.
- Gosh, Chan, Manuel & Dilimulati. *Can education counter violent religious extremism?*. Canadian Foreign Policy Journal, (2016). DOI: 10.1080/11926422.2016.1165713
- Hasanbaev, U., Experince of Fighting Against Radicalism and Extremism in New Uzbekistan, Science and Innovation International Scientific Journal, 2023; 2 (4), <https://doi.org/10.5281/zenodo.7810626>
- Hiariej, E. (2010). "Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISSN 1410-4946)*. 14, (2), 131-168.
- Hobsbawm, E. (1990). *Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality*. Cambridge University Press.
- Hoskins, B., & Mascherini, M. (2009). Measuring Active Citizenship through the Development of a Composite Indicator. *Social Indicators Research*, 90(3), 459-488
- Jajuri, R. A., & Rahmat, R. (2021). *Strategi penanggulangan radikalisme di perguruan tinggi*. *An-Nidzam: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, 1(2), 55-69. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/An-Nidzam/article/download/163/137>
- Kaishauri, G. EU-wide CVE Programs: Exploring the Gap between Theory and Practice. 2021; 93 pages. Master's thesis (Mgr.). Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies. Department of Security Studies, Supervisor Markéta Kocmanová.
- Kemendikbudristek, 2024, Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi: Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.
- Koehler, D., Fiebig, V., Knowing What to Do: Academic and Practitioner
- Kosasih A, Supriyadi T, Firmansyah MI, Rahminawati N. Higher-Order Thinking Skills in Primary School: Teachers' Perceptions of Islamic Education. *J Ethn Cult Stud*. 2022;9(1):56-76.
- Mulyana, R. (2024). Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Menghadapi Tantangan Global. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(1), 12-27.
- Pudjiastuti, S. R. (2021). *Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah paham radikal*. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(2). <https://doi.org/10.21009/jimd.v19i02.14788>
- Putri, A. S., Sari, A. C., Hapsari, A. R., Pramesti, C. N., Emiru'din, E., Khasanah, M. U., ... Nugraha, D. M. (2024). *Pemaknaan melemahnya implementasi nilai Pancasila bagi mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi UPI*. *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 28-33. <https://doi.org/10.53682/jce.v8i1.10089>
- Rijadi, D., Khadir, A., & Fortuna, R. (2022). *The Role of Civic Education in the Integration of the Indonesian Nation*. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1
- Rheingold, H. (2012). *Net Smart: How to Thrive Online*. MIT Press.
- Tambunan, R., Anggraeni, D. D., & Asyari, D. (2023). *Implementation of the Second Preceptive of Pancasila to Overcome the Crisis Generation Z Identity in the Globalization Era*. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5
- Tanszil, S. W., Suryadi, K., Komalasari, K., Anggraeni, L., & Matang. (2025). *Radicalism in the*

Age of Digital Technology: A Bibliometric Study . Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology. 50 (2), 18-29.
https://semarakilmu.com.my/journals/index.php/applied_sciences_eng_tech/article/view/10514/5699

Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy. *American Educational Research Journal*, 41(2), 237-269.